

KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Fatia Hadaya Panjaitan ^{*1}, Ahmad Wahyudi Zein ²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia ^{1,2}

Corresponding Author: fatiahadaya01@gmail.com ¹, ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id ²

Info Artikel

Submitted: 03 Januari 2026

Revised : 08 Januari 2026

Accepted: 15 Januari 2026

Published: 17 Januari 2026

Keywords: Fiscal Policy, Islamic Economics, Islamic Public Finance, Social Justice, Maqasid al-Sharia

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Ekonomi Islam, Keuangan Publik Islam, Keadilan Sosial, Maqashid Syariah

Abstract

Fiscal policy is a crucial instrument in managing a country's economy aimed at achieving economic stability, income distribution, and public welfare. From an Islamic perspective, fiscal policy is not solely oriented toward economic efficiency but also emphasizes the values of justice, balance, and social responsibility in accordance with Sharia principles. Islam views fiscal policy as a means to realize the objectives of Sharia (maqasid al-sharia), particularly in safeguarding wealth, life, and the overall well-being of society through the management of lawful and transparent state revenues and expenditures. Sources of public revenue in Islam, such as zakat, kharaj, jizyah, fai', and ghanimah, play a strategic role in supporting economic development and reducing social inequality. Meanwhile, public expenditures are directed toward fulfilling basic societal needs, poverty alleviation, the provision of public services, and the protection of vulnerable groups. Thus, fiscal policy from an Islamic perspective functions not only as a macroeconomic instrument but also as a moral and social mechanism to achieve distributive justice and sustainable welfare.

Abstrak

Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian suatu negara yang bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan prinsip syariah. Islam memandang kebijakan fiskal sebagai sarana untuk mewujudkan maqashid syariah, terutama dalam menjaga harta, jiwa, dan kesejahteraan umat melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara yang halal dan transparan. Sumber-sumber penerimaan negara dalam Islam seperti zakat, kharaj, jizyah, fai', dan ghanimah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Sementara itu, pengeluaran negara diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan publik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi makro, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial untuk mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan yang berkelanjutan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan ekonomi makro yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas perekonomian melalui pengelolaan pendapatan dan belanja negara. Dalam praktiknya, kebijakan fiskal berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, mengendalikan inflasi, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, negara dituntut untuk merumuskan kebijakan fiskal yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan fiskal perlu didasarkan pada nilai-nilai yang mampu menjawab persoalan ekonomi sekaligus sosial secara komprehensif.

Islam sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh memiliki konsep ekonomi yang menempatkan keadilan dan keseimbangan sebagai prinsip fundamental. Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal tidak semata-mata dipahami sebagai alat teknis pengelolaan keuangan negara, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Pengelolaan fiskal dalam Islam berorientasi pada pencapaian *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, keharusan distribusi kekayaan yang adil, serta kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan fiskal Islam. Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam Islam memiliki dimensi moral dan spiritual yang membedakannya dari sistem fiskal konvensional.

Dalam konteks negara modern yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kajian mengenai kebijakan fiskal dalam perspektif Islam menjadi semakin relevan dan strategis. Penerapan prinsip-prinsip fiskal Islam, seperti optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan pengelolaan sumber daya publik yang adil, berpotensi memberikan solusi alternatif terhadap berbagai permasalahan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam konsep, prinsip, serta implementasi kebijakan fiskal dalam perspektif Islam, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian kebijakan fiskal dalam perspektif Islam

lebih menekankan pada analisis konseptual, normatif, dan filosofis yang bersumber dari literatur ilmiah dan teks-teks keislaman. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber sekunder berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas kebijakan fiskal, ekonomi Islam, dan keuangan publik Islam. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali dan memahami konsep serta prinsip kebijakan fiskal Islam secara komprehensif dan sistematis.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan konsep-konsep utama, argumentasi para ahli, serta landasan normatif yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dalam Islam. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu menelaah makna, konteks, dan relevansi isi teks terhadap permasalahan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan pandangan para ulama dan ekonom Muslim terkait kebijakan fiskal serta mengaitkannya dengan kondisi ekonomi kontemporer.

Dalam rangka menjaga keabsahan dan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi dari literatur klasik dan modern. Selain itu, peneliti juga melakukan penafsiran data secara kritis dan objektif agar hasil penelitian tidak bersifat bias dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Hasil analisis data kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai konsep, sumber penerimaan dan pengeluaran negara, serta peran kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami secara mendalam konsep serta prinsip dasar kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai landasan normatif dan filosofis kebijakan fiskal Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran para ulama dan ekonom Muslim. Pemahaman tersebut penting untuk menjelaskan perbedaan mendasar antara kebijakan fiskal Islam dan kebijakan fiskal konvensional, khususnya dalam hal orientasi nilai, tujuan kebijakan, serta peran negara dalam pengelolaan keuangan publik.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sumber-sumber penerimaan serta pola pengeluaran negara dalam sistem kebijakan fiskal Islam. Penelitian ini berupaya menjelaskan peran instrumen-instrumen fiskal Islam seperti zakat,

infak, sedekah, kharaj, jizyah, dan pengelolaan aset publik dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Dengan mengkaji mekanisme penerimaan dan pengeluaran tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan fiskal Islam dalam menjawab tantangan ekonomi modern, khususnya terkait pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial.

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan fiskal Islam dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi makro, tetapi juga sebagai sarana moral dan sosial yang berorientasi pada pencapaian *maqashid syariah*. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian ekonomi Islam serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi perumusan kebijakan publik yang adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Prinsip Dasar Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam

Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, kebijakan fiskal Islam menempatkan nilai moral dan etika sebagai fondasi utama. Negara dipandang sebagai pihak yang memegang amanah untuk mengelola keuangan publik demi kepentingan seluruh masyarakat, bukan kelompok tertentu. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal harus dilandasi prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab sosial.¹

Prinsip utama kebijakan fiskal Islam adalah kesesuaian dengan syariat, yang berarti seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran negara harus berasal dari aktivitas yang halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Islam melarang praktik riba, gharar, dan maysir dalam pengelolaan keuangan negara karena dinilai merusak keadilan ekonomi dan menimbulkan ketimpangan sosial. Sebaliknya, Islam mendorong distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme fiskal yang adil dan transparan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian moral dalam kehidupan bermasyarakat.

¹ Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

Selain itu, kebijakan fiskal Islam berorientasi pada pencapaian *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks fiskal, *maqashid syariah* tercermin dalam kebijakan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.² Negara berkewajiban memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencegah terjadinya kesenjangan sosial yang ekstrem.

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) juga menjadi ciri penting dalam kebijakan fiskal Islam. Islam mengajarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta antara hak dan kewajiban. Dalam hal ini, negara tidak boleh bersikap terlalu dominan sehingga mengekang kebebasan ekonomi individu, tetapi juga tidak boleh lepas tangan terhadap masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kebijakan fiskal Islam berupaya menciptakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan.

Sumber-Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Negara dalam Sistem Kebijakan Fiskal Islam

Sumber penerimaan negara dalam sistem fiskal Islam memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan sistem konvensional. Islam mengenal berbagai instrumen penerimaan negara yang bersumber dari ketentuan syariah, seperti zakat, kharaj, jizyah, fai', dan ghanimah. Instrumen-instrumen tersebut dirancang untuk memastikan adanya distribusi kekayaan yang adil dan berimbang di tengah masyarakat.³ Zakat, misalnya, merupakan kewajiban finansial yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial, yang bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Zakat memiliki peran strategis sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk delapan golongan penerima (*asnaf*) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Pengelolaan zakat oleh negara bertujuan agar pendistribusiannya lebih efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan. Selain zakat, kharaj sebagai pajak atas tanah produktif dan jizyah sebagai kontribusi warga non-Muslim juga menjadi sumber penerimaan yang mencerminkan prinsip keadilan dan toleransi dalam Islam. Semua instrumen ini menunjukkan bahwa sistem fiskal Islam telah memiliki mekanisme pendanaan publik yang matang sejak masa awal peradaban Islam.⁴

² Chapra, M. U. (2016). *Islam and the Economic Challenge*. Jakarta: Gema Insani Press.

³ Mannan, M. A. (1997). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Delhi: Idarah Adabiyah.

⁴ Rahman, A. (1995). *Economic Doctrines of Islam*. Lahore: Islamic Publications Ltd.

Di sisi pengeluaran, kebijakan fiskal Islam mengarahkan belanja negara untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran negara difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti penyediaan pangan, pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, serta keamanan. Negara juga berkewajiban memberikan bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, dan kelompok rentan lainnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Prinsip ini menegaskan bahwa belanja negara dalam Islam tidak boleh bersifat konsumtif yang berlebihan atau hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Pengeluaran negara dalam Islam juga harus memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. Setiap dana publik harus digunakan secara amanah dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral. Islam sangat menekankan larangan penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, kebijakan fiskal Islam mendorong tata kelola keuangan publik yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Peran Kebijakan Fiskal Islam dalam Mewujudkan Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan fiskal Islam memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial, yang merupakan salah satu tujuan utama sistem ekonomi Islam. Keadilan sosial dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan hasil, tetapi sebagai kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Melalui instrumen fiskal seperti zakat dan belanja sosial, negara berperan aktif dalam mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif.⁵

Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, kebijakan fiskal Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.⁶ Pengeluaran negara diarahkan untuk menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang memungkinkan masyarakat hidup dengan martabat dan keamanan. Dengan pendekatan ini, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan fiskal Islam juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Dengan pengelolaan keuangan publik yang adil dan seimbang, potensi konflik sosial akibat

⁵ Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

⁶ Zallum, A. Q. (2009). *Sistem Keuangan Negara Khilafah*. Jakarta: HTI Press.

ketimpangan ekonomi dapat diminimalkan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya saja, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Prinsip ini menjadi landasan kuat bagi kebijakan fiskal Islam dalam menciptakan stabilitas dan harmoni sosial di tengah masyarakat.

Selain itu, kebijakan fiskal Islam mendorong partisipasi sosial dan solidaritas antaranggota masyarakat. Instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai sarana membangun kepedulian sosial. Dengan adanya kesadaran kolektif untuk saling membantu, masyarakat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Peran negara dalam mengelola instrumen ini memastikan bahwa solidaritas sosial berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal dalam perspektif Islam merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Kebijakan fiskal Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan aspek moral dan spiritual dalam setiap perumusan dan implementasinya. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, keharusan distribusi kekayaan yang adil, serta orientasi pada *maqashid syariah* menjadi dasar utama dalam mengarahkan kebijakan fiskal agar mampu menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran negara dalam sistem fiskal Islam menunjukkan adanya mekanisme yang sistematis dan terintegrasi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Instrumen penerimaan seperti zakat, kharaj, jizyah, dan pengelolaan aset publik dirancang untuk menjamin pemerataan distribusi kekayaan, sementara pengeluaran negara diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan pengelolaan yang amanah, transparan, dan efisien, kebijakan fiskal Islam mampu menjadi sarana efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Lebih lanjut, kebijakan fiskal Islam memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan nilai-nilai sosial, kebijakan fiskal Islam mendorong terciptanya solidaritas, partisipasi sosial, dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip kebijakan fiskal Islam secara konsisten dapat menjadi alternatif yang relevan

bagi negara-negara modern dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan umat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2016). *Islam and the Economic Challenge*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mannan, M. A. (1997). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Delhi: Idarah Adabiyah.
- Rahman, A. (1995). *Economic Doctrines of Islam*. Lahore: Islamic Publications Ltd.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Zallum, A. Q. (2009). *Sistem Keuangan Negara Khilafah*. Jakarta: HTI Press.